

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN ISU BANJIR DI SURABAYA: ANALISIS RESPONS DAN PERAN DPRD SURABAYA TERHADAP ASPIRASI WARGA

Alya Diva Alfitrah

UIN Sunan Ampel Surabaya

10040123068@uinsa.ac.id

Hana Novia Keysa Saharani

UIN Sunan Ampel Surabaya

10010123013@uinsa.ac.id

Melita Iwandari

UIN Sunan Ampel Surabaya

10020123041@uinsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dan respons DPRD Surabaya dalam penanganan banjir di Kota Surabaya. Permasalahan muncul karena partisipasi warga seringkali tidak diimbangi dengan respons kelembagaan yang cepat dan tepat. Kegelisahan akademik dalam penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara aspirasi warga yang disampaikan melalui forum formal dan efektivitas tindakan yang diambil oleh DPRD sebagai representasi politik lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan analisis dokumen, serta dianalisis melalui model interaktif Miles dan Huberman. Temuan menunjukkan bahwa warga terlibat aktif dalam kerja bakti, pelaporan banjir, dan Musrenbang, namun DPRD belum sepenuhnya responsif dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut. Dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat dan responsivitas pemerintah, studi ini menekankan pentingnya sinergi antara warga dan DPRD untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Partisipasi, Responsivitas, DPRD Surabaya, Banjir

Abstract

This study discusses community participation and the response of the Surabaya DPRD in handling floods in the city of Surabaya. Problems arise because community participation is often not balanced with a fast and appropriate institutional response. The academic anxiety in this study stems from the gap between community aspirations conveyed through formal forums and the effectiveness of actions taken by the DPRD as a local

political representation. The study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of literature studies and document analysis, and is analyzed through the Miles and Huberman interactive model. The findings show that residents are actively involved in community service, flood reporting, and Musrenbang, but the DPRD has not been fully responsive in following up on these aspirations. By using the theory of community participation and government responsiveness, this study emphasizes the importance of synergy between residents and the DPRD to create inclusive and equitable environmental governance.

Keywords: Participation, Responsiveness, Surabaya DPRD, Flood

Article History: Received 18 March 2024, Revised: 30 April 2024, Accepted: 05 May 2024, Available online 01 January 2025

PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang krusial dan berulang dihadapi oleh Kota Surabaya. Setiap kali musim penghujan tiba, berbagai wilayah di kota ini mengalami genangan air dengan intensitas dan durasi yang beragam. Dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas, mencakup kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, peningkatan risiko penyakit, serta menurunnya kualitas hidup warga. Dalam konteks tata kota modern, banjir tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis terkait sistem *drainase*, melainkan juga sebagai cerminan kompleksitas tata kelola lingkungan, perencanaan kota, dan relasi antara negara dan warga dalam merespons krisis ekologis yang berulang.

Menurut laporan Kominfo Jawa Timur (2024), faktor utama penyebab banjir di Surabaya adalah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, konversi lahan hijau menjadi kawasan permukiman dan komersial, penyempitan badan sungai akibat bangunan liar, serta hilangnya fungsi area resapan air karena pembangunan infrastruktur yang tidak memperhitungkan daya dukung ekologis. Proses urbanisasi yang cepat dan tidak terencana menyebabkan sistem drainase kota menjadi tidak seimbang, terutama di wilayah barat dan selatan kota yang rentan genangan. Masalah ini diperparah oleh rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat, seperti

kebiasaan membuang sampah ke sungai, yang turut menyumbat saluran air.¹

Sejarah menunjukkan bahwa persoalan banjir di Surabaya bukan hal baru. Husain (2016) mencatat bahwa sejak pertengahan abad ke-20 hingga 1970-an, banjir telah menjadi bagian dari siklus bencana musiman di kota ini. Saat itu, masyarakat melakukan berbagai upaya penanggulangan secara swadaya, seperti menumpuk karung pasir, memperbaiki saluran air secara gotong royong, hingga berkoordinasi di tingkat RT/RW. Meskipun metode tersebut bersifat tradisional dan terbatas dari sisi teknis, namun nilai partisipasi dan kesadaran kolektif menjadi kekuatan sosial utama dalam menghadapi bencana.²

Namun, seiring perkembangan kota dan kompleksitas birokrasi pemerintahan, penanggulangan banjir tidak lagi bisa ditangani secara individual atau komunitarian semata. Perlu ada kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, dan tentu saja masyarakat itu sendiri. Dalam konteks inilah partisipasi masyarakat menjadi krusial sebagai komponen tata kelola yang demokratis, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan warga. Partisipasi masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan dalam kegiatan fisik seperti gotong royong, tetapi juga dalam bentuk yang lebih strategis seperti pelaporan masalah melalui kanal resmi, keikutsertaan dalam forum perencanaan pembangunan, serta penyampaian aspirasi dalam musyawarah tingkat kelurahan dan kecamatan (Musrenbang).

Meski pemerintah kota telah berupaya mengembangkan program penanggulangan banjir, tantangan serius tetap ada. Pangestu dkk (2024) menunjukkan bahwa sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih lemah, koordinasi antar sektor belum optimal, dan efektivitas pemberdayaan masyarakat masih rendah. Sering kali aspirasi warga tidak sampai ke pengambil kebijakan karena terbatasnya kanal.

¹ Kominfo Jatim. (2024, Oktober 31), "Atasi Banjir, Pemkot Surabaya Kebut Pembangunan Saluran Air." <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/atasi-banjir-pemkot-surabaya-kebut-pembangunan-saluran-air>

² Husain, S. B., "Banjir, Pengendaliannya, dan Partisipasi Masyarakat di Surabaya, 1950 1976." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 18(1), 2016, hal: 65–80.

komunikasi yang efektif. Di sisi lain, birokrasi juga kerap dianggap lamban merespons aduan masyarakat, sehingga menimbulkan apatisme publik dan berkurangnya kepercayaan terhadap institusi formal. Dalam kondisi seperti ini, peran lembaga legislatif daerah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, menjadi sangat strategi.³

Sebagai representasi politik warga, DPRD memiliki tiga fungsi utama yang sangat penting dalam konteks penanggulangan banjir, yaitu fungsi legislasi, penganggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*controlling*). DPRD dapat memperjuangkan penyusunan regulasi yang berpihak pada lingkungan, mendorong pengalokasian anggaran yang lebih responsif terhadap wilayah rawan banjir, serta mengawasi implementasi kebijakan agar tepat sasaran. Salah satu upaya nyata DPRD Surabaya adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan Banjir yang bertugas merumuskan solusi jangka panjang berbasis inovasi pengelolaan air, modernisasi sistem drainase, dan kolaborasi lintas sektor.⁴

Selain itu, dalam kegiatan reses dan audiensi, DPRD memiliki ruang langsung untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi warga. Respons DPRD terhadap isu banjir merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi lokal serta efektivitas sistem representasi di tingkat daerah. Dalam konteks ini, penting untuk dikaji sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan, serta bagaimana tindak lanjut kebijakan dilakukan secara konkret oleh DPRD. Analisis akademik yang berbasis data dan kajian kritis diperlukan guna mengidentifikasi efektivitas respons kelembagaan terhadap persoalan lingkungan yang terus berulang seperti banjir.

Perlu dipahami pula bahwa banjir di Surabaya tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial. Kawasan padat penduduk dan wilayah pesisir sering kali menjadi

³ Pangestu, A. A. et al., "Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pakal Kota Surabaya." *Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 2024, hal: 1540–1555. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.3158>

⁴ ANTARA JATIM, (2025, Januari 23), "DPRD Surabaya Bentuk Panitia Khusus Penanggulangan Banjir" <https://jatim.antaranews.com/berita/873718/dprd-surabaya-bentuk-panitia-khusus-penanggulangan-banjir>

langganan banjir, sementara kemampuan warga di wilayah tersebut untuk melakukan adaptasi cenderung terbatas. Oleh karena itu, studi mengenai partisipasi warga dalam isu banjir bukan semata kajian tentang lingkungan, tetapi juga studi tentang keadilan sosial, akses terhadap layanan publik, dan hak atas lingkungan yang sehat. Dalam perspektif ini, penguatan peran DPRD untuk menjembatani suara warga dan menekan eksekutif agar bertindak lebih responsif menjadi elemen penting dalam membangun tata kelola yang berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menghadapi banjir di Surabaya serta mengevaluasi sejauh mana DPRD Surabaya merespons aspirasi tersebut. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan banjir di Surabaya? dan (2) Sejauh mana DPRD Surabaya merespons aspirasi warga terkait isu banjir?

Perlu dicatat bahwa dalam penelitian ini belum tersedia data kuantitatif secara rinci mengenai jumlah kawasan terdampak banjir maupun jumlah aspirasi warga yang diterima secara resmi oleh DPRD Surabaya melalui mekanisme reses atau forum komunikasi publik lainnya. Keterbatasan ini disebabkan oleh belum tersedianya laporan publik yang secara terbuka memuat angka-angka tersebut dalam format yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan didasarkan pada kajian literatur, laporan media, serta dokumen kebijakan yang relevan. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan penggalian data primer melalui wawancara dengan pihak DPRD atau instansi terkait, serta analisis dokumen resmi seperti laporan hasil reses, notulensi pansus, dan data titik genangan dari BPBD guna memperkaya dimensi kuantitatif dan mendalami validitas temuan.

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengayaan wacana akademik mengenai tata kelola lingkungan yang partisipatif dan berbasis kolaborasi kelembagaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memperkuat pemahaman tentang mekanisme representasi politik di tingkat lokal, khususnya dalam konteks pengelolaan bencana perkotaan yang berkelanjutan, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis dinamika partisipasi masyarakat dalam penanganan banjir serta mengevaluasi respons dan peran DPRD Surabaya terhadap aspirasi warga. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena sosial secara menyeluruh dan mendalam, khususnya dalam konteks hubungan antara masyarakat dan lembaga politik lokal.

Menurut Abdussamad, penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan, dengan hasil berupa uraian naratif yang menjelaskan makna dan pemahaman mendalam terhadap topik yang diteliti. Pendekatan ini dianggap cocok untuk mengkaji aspek-aspek sosial-politik seperti partisipasi warga dan respons kelembagaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.⁵

Subjek dalam penelitian ini adalah warga Kota Surabaya yang terdampak banjir serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya sebagai lembaga representatif. Fokus utama diarahkan pada dua aspek: bentuk partisipasi masyarakat dalam mengatasi banjir, dan bagaimana DPRD menindaklanjuti aspirasi yang muncul, baik melalui reses, audiensi, maupun kanal formal lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Peneliti menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi, laporan media, dokumen resmi DPRD Surabaya, serta informasi dari situs web instansi pemerintahan terkait. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif serta memperkuat validitas data yang digunakan dalam analisis.

⁵ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif. In Sustainability" (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1, 2019). CV. Syakir Media Pess.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1992), yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:

1. Reduksi data

Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilah, menyeleksi, dan menyederhanakan informasi dari berbagai sumber yang diperoleh untuk memastikan data yang dianalisis relevan dengan fokus kajian, yakni partisipasi masyarakat dan peran DPRD dalam isu banjir.

2. Penyajian data

Selanjutnya, data yang telah diringkas disusun dalam bentuk narasi tematik yang sistematis, guna mempermudah dalam mengidentifikasi pola dan keterkaitan antara partisipasi warga dan respons lembaga politik.

3. Penarikan kesimpulan

Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian, dengan menyusun interpretasi berdasarkan pemahaman teoritis dan data empiris yang tersedia. Penarikan kesimpulan bersifat reflektif, memungkinkan revisi pemahaman seiring bertambahnya data.

Model ini bersifat interaktif dan dilakukan secara berulang hingga data dianggap memadai dan tidak menghasilkan informasi baru. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai tepat untuk menggali secara mendalam hubungan antara partisipasi masyarakat, respons DPRD, serta efektivitas tata kelola bencana di tingkat lokal.⁶

KAJIAN LITERATUR DAN KERANGKA TEORI

Tinjauan Literatur

Jurnal yang ditulis oleh Mahfudlotur Rohmaniyah dan Linda Dwi Rohmadiani (2020) dengan judul "Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Banjir Sungai Buntung di Kecamatan Waru" menjadi kontribusi penting dalam kajian penanggulangan bencana berbasis

⁶ Sugiyono, "METODE PENELITIAN Kuantitatif Kualitatif dan R&D." 2013, Penerbit ALFABETA, Bandung

masyarakat.⁷ Fokus utama jurnal ini adalah bagaimana masyarakat Kecamatan Waru, wilayah yang dikenal rawan banjir, ikut berperan dalam tiga fase penanganan banjir sebelum, saat, dan sesudah banjir. Partisipasi ini dilihat dari bentuknya (tenaga, uang, dan pemikiran) dan tingkat keterlibatannya berdasarkan model tangga partisipasi Arnstein.

Kecamatan Waru memiliki tingkat kerentanan banjir yang cukup tinggi, terutama karena dilintasi oleh Sungai Buntung anak Sungai Brantas yang membentang sekitar 34 km dan mengalir melalui hampir seluruh desa di wilayah ini. Masalah semakin rumit karena masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan metode pengumpulan data melalui kuisioner, wawancara, dan observasi lapangan. Data kemudian dianalisis dengan teknik *persentase* dan *skoring* untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi yang paling menonjol adalah kontribusi tenaga. Sebelum banjir terjadi (tahap mitigasi), 41% warga berpartisipasi dengan tenaga, 25% memberikan dukungan dalam bentuk uang, hanya 10% menyumbang pemikiran, dan 24% tidak berpartisipasi sama sekali. Saat banjir berlangsung, partisipasi tenaga meningkat menjadi 58%, sementara partisipasi dalam bentuk pemikiran menurun drastis karena masyarakat lebih fokus pada upaya penyelamatan diri dan harta benda. Setelah banjir, meski partisipasi tenaga menurun menjadi 40%, kontribusi ini masih mendominasi dibandingkan dengan bentuk partisipasi lainnya 30% dalam bentuk uang dan 10% dalam bentuk buah pikiran.

Salah satu nilai penting dari jurnal ini adalah penerapan model partisipasi Arnstein, yang membagi tingkat partisipasi ke dalam delapan tangga, mulai dari manipulasi hingga citizen control. Dari sepuluh desa yang menjadi objek penelitian, hanya Desa Kepuh Kiriman yang mencapai tingkat “*delegated power*”, di mana masyarakat benar-benar dilibatkan

⁷ Rohmaniyah, M., & Rohmadiani, L. D, “Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Banjir Sungai Buntung di Kecamatan Waru.” *Jurnal Teknik WAKTU*, 18(1), 2020, hal: 15–25. <https://doi.org/10.36456/waktu.v18i1.2347>

dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program mitigasi banjir. Keberhasilan ini terlihat dari pembentukan organisasi lokal seperti “Polisi Sungai” yang berperan aktif dalam mencegah warga membuang sampah sembarangan ke sungai. Sementara itu, desa-desa seperti Waru dan Wedoro berada di tingkat “partnership”, yang mengindikasikan kemitraan sejajar antara masyarakat dan pemerintah sebuah pencapaian yang tetap signifikan.

Selanjutnya ialah jurnal karya Aryan Adi Pangestu dkk (2024) berjudul “Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pakal Kota Surabaya” menjadi salah satu referensi penting dalam kajian literatur mengenai penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan banjir.⁸ Penelitian ini menyoroti banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Pakal, wilayah Surabaya Barat, yang setiap tahunnya mengalami genangan di sekitar tujuh titik dengan ketinggian air bervariasi antara 15 cm hingga 1 meter.

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa observasi langsung dan wawancara dengan instansi terkait, seperti BPBD dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang meliputi proses pengumpulan data, kondensasi informasi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

Nilai penting jurnal ini terletak pada penggunaan teori peran menurut Sondang P. Siagian, yang membagi fungsi pemerintah ke dalam lima dimensi: stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana. Masing-masing peran ini dibahas berdasarkan temuan di lapangan. Sebagai stabilisator, pemerintah melakukan normalisasi sungai, membangun boezem, serta memasang pompa air guna mengurangi genangan. Dalam perannya sebagai inovator, DSDABM membentuk tim khusus, membangun sistem saluran baru, dan bekerja sama dengan BPBD dalam merancang rambu evakuasi.

⁸ Pangestu, A. A., et al, “Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pakal Kota Surabaya.” *Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 2024, hal: 1540–1555. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.3158>

Aspek modernisasi terlihat dari penggunaan teknologi seperti aplikasi Wargaku, media sosial, dan sistem Early Warning System (EWS) untuk menyebarkan informasi lebih cepat. Sementara itu, BPBD berperan sebagai pelopor dengan melakukan edukasi kesiapsiagaan dan simulasi bencana, serta mendirikan posko terpadu di lokasi rawan banjir. Peran pelaksana dijalankan melalui implementasi program-program yang bersumber dari peraturan daerah, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan pendekatan empiris dan kerangka teoritis yang kuat, jurnal ini tidak hanya memberikan gambaran konkret mengenai respons pemerintah terhadap bencana banjir, tetapi juga menyajikan acuan yang bermanfaat bagi penelitian serupa di wilayah lain.

Literatur review lain yang kami ambil ialah dari karya Putri Anggraeni Cahyaningrum dkk (2024), berjudul “Analisis Pengambilan Keputusan Pembangunan Sistem Drainase untuk Mengatasi Banjir di Kota Surabaya” merupakan literatur yang dikaji dalam konteks perencanaan tata ruang kota, pengelolaan lingkungan, serta manajemen risiko bencana di wilayah perkotaan.⁹ Penelitian ini mengangkat permasalahan banjir yang selama ini menjadi isu utama di Kota Surabaya, terutama akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan kota yang pesat dengan kemampuan sistem drainase yang ada. Dengan menggunakan pendekatan *Fishbone Analysis* (Diagram Ishikawa), jurnal ini mampu memetakan berbagai faktor penyebab banjir secara sistematis dan menyeluruh. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk mendukung proses pengambilan keputusan di ranah kebijakan publik.

Data yang disajikan dalam jurnal menunjukkan bahwa banjir masih menjadi ancaman nyata di berbagai wilayah Surabaya, terutama di bagian barat dan selatan. Berdasarkan prediksi dari BMKG serta analisis dokumen perencanaan daerah, sekitar 20–25% wilayah Surabaya diperkirakan berpotensi mengalami genangan saat musim hujan. Penyebab utama yang diidentifikasi antara lain adalah curah hujan tinggi, kenaikan muka air laut,

⁹ Cahyaningrum, P. A., Zakaria, M. F., & Jamal, A., “Analisis Pengambilan Keputusan Pembangunan Sistem Drainase untuk Mengatasi Banjir di Kota Surabaya.” *Jurnal Media Akademik*, 2(5), 2024.
<https://doi.org/10.62281/v2i5.293>

serta buruknya kondisi sistem *drainase* yang ada. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti isu klasik dalam tata ruang kota, yakni pertumbuhan kawasan permukiman padat yang tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti saluran air dan ruang terbuka hijau.

Dari sisi kebijakan, jurnal ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang tidak hanya didasarkan pada aspek teknis semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi geografis, perencanaan tata ruang, serta keterlibatan masyarakat. Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam memetakan wilayah rawan banjir dan menganalisis aliran air menjadi salah satu poin penting dalam pengelolaan bencana yang berkelanjutan. Lebih jauh, jurnal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan terintegrasi dalam perencanaan, di mana sistem drainase harus dikaitkan dengan pengembangan infrastruktur lain seperti jaringan jalan, fasilitas umum, hingga pemukiman warga.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis penanggulangan banjir dan peran pemerintah eksekutif atau masyarakat secara terpisah, seperti bentuk partisipasi masyarakat dan inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan banjir. Namun, kajian yang secara khusus membahas bagaimana DPRD Surabaya merespons aspirasi warga dalam isu banjir masih sangat terbatas. Padahal, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan penanggulangan banjir. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara mendalam dinamika partisipasi masyarakat sekaligus mengevaluasi respons dan peran DPRD Surabaya dalam menanggapi aspirasi warga terdampak banjir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam diskursus tata kelola lingkungan berbasis partisipasi dan kolaborasi kelembagaan di tingkat lokal, sekaligus memperkaya pemahaman tentang mekanisme representasi politik dalam pengelolaan bencana perkotaan.

Kerangka Teori

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi ialah keterlibatan seseorang dalam suatu situasi, baik secara mental, pikiran, emosi, maupun fisik, yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya mencapai tujuan tertentu dan ikut bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi lebih menekankan pada keterlibatan mental dan emosional, sehingga menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap kelompok atau kegiatan yang diikuti. Partisipasi juga merupakan salah satu konsep pokok dalam pengembangan masyarakat, karena berkaitan erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk terlibat dalam proses demokrasi dan pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjelaskan bagaimana dan mengapa masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan, terutama dalam konteks pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program-program sosial. Inti dari hal ini adalah bahwa partisipasi masyarakat merupakan proses pemberian sumbangsih secara sukarela dari individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri. partisipasi masyarakat juga membedakan beberapa bentuk partisipasi, mulai dari partisipasi pasif (hanya diberitahu atau mengikuti tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan), partisipasi konsultatif (masyarakat diminta pendapatnya), hingga partisipasi aktif dan interaktif (masyarakat terlibat penuh dalam analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program).¹⁰

2. Teori Responsivitas Pemerintah

Responsivitas pemerintah adalah konsep yang menekankan kemampuan dan kepekaan pemerintah (atau organisasi publik) dalam mengenali, memahami, dan menanggapi kebutuhan, harapan, aspirasi, serta tuntutan masyarakat secara cepat, tepat, dan relevan Responsivitas juga

¹⁰ Arbayah, S., & Suparti, H., "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong." *Jurnal PubBis*, 6(1), 2022, hal: 30–48.
<https://doi.org/10.35722/pubbis.v6i1.516>

diartikan sebagai daya tanggap birokrasi terhadap permasalahan publik, yang mencakup penyusunan agenda, penetapan prioritas, hingga pengembangan program pelayanan publik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.¹¹

Responsivitas mencerminkan kemampuan birokrasi untuk secara cepat dan tepat merespons kebutuhan, aspirasi, serta perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam praktiknya, birokrasi dituntut peka terhadap persoalan nyata yang dihadapi oleh warga, baik melalui sarana formal seperti survei dan forum diskusi warga, maupun lewat pengamatan langsung di lapangan. Tidak cukup hanya mengenali kebutuhan, birokrasi yang responsif juga harus mampu merancang agenda dan menetapkan prioritas pelayanan publik yang sesuai, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup perumusan kebijakan yang tepat sasaran, pengelolaan anggaran yang efisien, dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Responsivitas juga terlihat dari kemampuannya dalam mengembangkan layanan publik yang adaptif, inovatif, dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat.¹²

Kedua teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini. Teori partisipasi masyarakat membantu mengidentifikasi bentuk-bentuk keterlibatan warga dalam penanganan banjir, baik secara langsung maupun melalui mekanisme demokratis seperti musyawarah, pelaporan, dan advokasi publik. Sementara itu, teori responsivitas pemerintah digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana DPRD Surabaya, sebagai lembaga representatif, mampu merespons kebutuhan dan aspirasi warga secara cepat, tepat, dan relevan. Dengan memadukan kedua kerangka teori ini, penelitian ini berupaya menjelaskan dinamika hubungan antara warga dan lembaga politik lokal dalam konteks tata kelola lingkungan, serta menilai apakah partisipasi masyarakat benar-benar diakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan.

¹¹ Tinambun, M., No Title Responsivitas pemerintah Pakpak Bharat dalam mengendalikan harga jual gambir (Studi penguatan ekonomi petani gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat), 2023.

¹² Setianingrum, T., & Tsalatsa, Y., "Mempertanyakan responsivitas pelayanan publik pada pengelolaan pengaduan kasus Upik di Kota Yogyakarta." 24(1), 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Banjir di Surabaya

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan banjir di Surabaya merupakan cerminan dari dinamika sosial, kesadaran kolektif, dan keterlibatan warga dalam menghadapi tantangan lingkungan yang terjadi berulang kali. Partisipasi ini dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yakni partisipasi individual dan partisipasi kolektif-komunal. Secara individual, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi melakukan upaya mandiri untuk melindungi huniannya. Sebagai contoh, mereka meninggikan lantai rumah dan membeli pompa penyedot air agar banjir tidak merusak harta benda. Namun bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, upaya yang dilakukan biasanya lebih sederhana, seperti menumpuk karung pasir atau membangun tanggul darurat dari bahan seadanya di depan rumah untuk menghalangi air masuk.

Sementara itu, partisipasi kolektif lebih banyak terlihat melalui aksi gotong royong warga yang dikoordinasi oleh RT/RW. Mereka bergandengan tangan untuk membersihkan saluran air, memperbaiki tanggul yang bocor, dan membangun jalur evakuasi darurat. Gotong royong ini tidak hanya berlangsung saat banjir melanda, tetapi juga sebagai kegiatan rutin dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah banjir datang kembali. Di beberapa wilayah, warga juga aktif menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada DPRD setempat melalui forum warga, sehingga menunjukkan bahwa partisipasi ini tidak hanya fisik tetapi juga politis. Namun, tidak semua bentuk partisipasi masyarakat bersifat konstruktif. Dalam beberapa kasus yang tercatat pada tahun 1950-an hingga 1970-an, masyarakat bahkan membobol tanggul sungai secara sengaja untuk menyelamatkan daerah tempat tinggalnya dari banjir. Ironisnya, tindakan ini justru menyebabkan banjir di wilayah lain yang lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan lokal dan tata kelola bencana yang lemah, serta kurangnya koordinasi antara warga dengan pihak pemerintah kota.¹³

¹³ Husain, S. B., "Banjir, Pengendaliannya, dan Partisipasi Masyarakat di Surabaya, 1950 1976." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 18(1), 2016, hal: 65–80.

Salah satu bentuk partisipasi dan cara paling sederhana dalam menjaga lingkungan adalah dengan tidak membuang sampah ke saluran air atau sungai. Kebiasaan ini sudah lama menjadi penyebab utama saluran tersumbat dan akhirnya memicu banjir. Karena itu, masyarakat diharapkan bisa lebih disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama saluran air. Pemerintah memang sudah mengerahkan Satgas Sampah dan Satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, namun tetap saja, peran aktif warga adalah faktor penentu utama keberhasilan upaya ini.

“Kalau budaya buang sampah di saluran itu tidak dihentikan bersiaplah kota ini berakrab ria dengan banjir. Saatnya Satgas Sampah dan Satpol PP siaga di setiap saluran air,” ujar AH Thony selaku anggota DPRD kota Surabaya.¹⁴

Selain bentuk-bentuk tersebut, pendidikan kewarganegaraan juga mendorong partisipasi warga melalui pendekatan nilai dan kesadaran lingkungan. Misalnya, di Kelurahan Jebres, Surakarta sebagai studi pembanding warga dilibatkan dalam proses perencanaan berbasis komunitas, seperti dalam program Neighbourhood Development. Masyarakat aktif dalam tahapan sosialisasi, perencanaan mikro dan makro, serta pelaksanaan kegiatan pencegahan banjir. Kegiatan tersebut mencakup lomba kebersihan, penanaman pohon di lahan kosong, dan lomba pembuatan maket desa untuk pemetaan risiko banjir.

Keseluruhan upaya ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada kebijakan teknis dari pemerintah, tetapi juga pada tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat. Keterlibatan masyarakat adalah bentuk penguatan kapasitas lokal untuk tanggap bencana secara berkelanjutan. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat, membangun kepercayaan publik, dan menciptakan mekanisme kolaboratif

¹⁴ Deny Prastyo. (2024, April 16). “DPRD Soroti Penanganan Banjir di Surabaya, Ingatkan Warga Terlibat aktif.” DetikJatim: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7295541/dprd-soroti-penanganan-banjir-di-surabaya-ingatkan-warga-terlibat-aktif>.

yang lebih inklusif demi menciptakan tata kelola lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁵

Respons dan Peran DPRD Surabaya dalam Menanggapi Aspirasi Masyarakat

DPRD Surabaya sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran sentral dalam merespons aspirasi warga, terutama dalam isu lingkungan seperti banjir yang bersifat berulang dan berdampak luas. Melalui perspektif responsivitas pemerintah, respons DPRD dapat dikaji dari tiga aspek: penerimaan aspirasi, perumusan kebijakan, dan pengawasan implementasi. Selain itu, peran partisipatif warga dalam menyampaikan aspirasi menjadi fondasi utama dalam membentuk sinergi antara masyarakat dan lembaga politik lokal.

1. Penyerapan Aspirasi melalui Reses dan Forum Publik

DPRD Surabaya menjalankan mekanisme penjangkaran aspirasi warga melalui kegiatan reses yang dilakukan setiap tahun. Dalam forum ini, anggota dewan mendengarkan langsung keluhan dan usulan dari masyarakat di wilayah pemilihannya. Aspirasi yang disampaikan warga kemudian dikompilasi menjadi *Pokok Pikiran DPRD* (Pokir) dan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Praktik ini mencerminkan adanya dimensi *input responsiveness*, yakni kemampuan lembaga untuk menerima masukan dari konstituen secara langsung dan sistematis.¹⁶

2. Implementasi Aspirasi dalam Kebijakan Daerah

Tahap selanjutnya dari proses responsivitas adalah perumusan kebijakan yang berbasis pada aspirasi warga. DPRD Surabaya telah mengintegrasikan berbagai usulan masyarakat ke dalam pembahasan

¹⁵ Imamsari, F. S., Triastuti, R., & Wijianto, W., "Partisipasi Masyarakat pada Penanggulangan Banjir dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Eductizen*, 2(1), 2017

¹⁶ Pangestu, A. A., et al, "Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pakal Kota Surabaya." *Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 2024, hal: 1540–1555. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.3158>

RAPBD, terutama yang berkaitan dengan normalisasi saluran air, pembangunan rumah pompa, serta peningkatan sistem drainase di kawasan rawan banjir. Komisi-komisi di DPRD, seperti Komisi A dan Komisi C, turut serta mendorong sinkronisasi kebijakan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sehingga suara warga benar-benar terefleksi dalam kebijakan konkret. Inisiatif ini mencerminkan dimensi *policy responsiveness*, yakni sejauh mana kebijakan publik dirancang berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat.¹⁷

3. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD menjadi pilar utama dalam memastikan realisasi kebijakan di lapangan. Beberapa anggota DPRD melakukan kunjungan langsung ke lokasi terdampak banjir, mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur air, serta mengevaluasi program kerja dinas teknis yang berkaitan. Tindakan ini merupakan bentuk dari *output responsiveness*, yaitu bagaimana lembaga memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang benar-benar dilaksanakan dan memberikan dampak yang nyata bagi warga. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti rendahnya tingkat partisipasi warga dalam forum reses dan munculnya ketidakpercayaan terhadap efektivitas tindak lanjut aspirasi.¹⁸

4. Sinergi Kolaboratif dalam Tata Kelola

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan Banjir oleh DPRD Surabaya pada awal tahun 2025 menjadi salah satu bentuk penguatan kolaborasi antara DPRD, masyarakat, dan aktor-aktor non-pemerintah. Dalam proses kerja Pansus, terlibat berbagai unsur seperti RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), hingga komunitas lingkungan seperti “Sejuk Suroboyo” yang secara aktif memberikan masukan berbasis data lapangan. Kolaborasi ini memperkuat prinsip *co-production* dalam tata kelola publik, di mana masyarakat

¹⁷ ANTARA Jatim, (2025, Januari 23), “DPRD Surabaya Bentuk Panitia Khusus Penanggulangan Banjir.” <https://jatim.antaranews.com/berita/873718/dprd-surabaya-bentuk-panitia-khusus-penanggulangan-banjir>

¹⁸ Samosir, M. M., & Tukiman, “Efektivitas Kebijakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses SPRS Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Publicuho*, 7(4), 2024. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.565>

berperan tidak hanya sebagai pelapor, tetapi juga sebagai mitra dalam perumusan solusi kebijakan.¹⁹

Sinergi Partisipasi Masyarakat dan Respon DPRD dalam Tata Kelola Penanggulangan Banjir

Penanggulangan banjir yang efektif di tingkat kota tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara masyarakat sebagai aktor partisipatif dan DPRD sebagai lembaga representatif. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, partisipasi warga Surabaya tidak hanya berbentuk kerja fisik, tetapi juga pelibatan dalam forum-forum aspiratif. Di sisi lain, DPRD tidak hanya menampung keluhan, tetapi juga memiliki fungsi penganggaran dan legislasi yang dapat memperkuat kebijakan penanganan banjir. Dalam konteks ini, hubungan antara warga dan DPRD perlu dipahami sebagai bentuk sinergi dua arah dalam tata kelola bencana.

Dalam praktiknya, sinergi ini terwujud melalui kanal-kanal partisipasi digital seperti aplikasi WargaKu, media sosial DPRD, serta forum formal seperti Musrenbang dan reses. Melalui kanal tersebut, laporan masyarakat mengenai titik banjir, drainase tersumbat, dan permintaan normalisasi sungai dikompilasi ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan Pokok Pikiran DPRD (Pokir) untuk RAPBD. Mekanisme ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara aspirasi warga dan arah kebijakan daerah.²⁰

Bukti konkret dari penguatan sinergi (hubungan) ini terlihat dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan Banjir oleh DPRD Surabaya pada Januari 2025. Pansus ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), hingga komunitas peduli sungai. Forum ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi ruang deliberatif untuk menyusun strategi pengurangan risiko bencana berbasis data lapangan. Dalam beberapa rapat dengar pendapat, DPRD juga mengundang komunitas lingkungan seperti “Sejuk

¹⁹ Elaine, M., (2025, Januari 24). “DPRD Surabaya Bentuk Pansus Penanggulangan Banjir.” Suarasureabaya.Net.
<https://www.suarasureabaya.net/kelanakota/2025/dprd-surabaya-bentuk-pansus-penanggulangan-banjir/>

²⁰ Ibid, Elaine, M., 2025

Suroboyo” untuk mempresentasikan model bio-retention sebagai alternatif pengelolaan limpasan air.²¹

Model kerja kolaboratif seperti ini memperkuat prinsip *co-production*, yakni proses di mana masyarakat menyumbang data mikro dan pengalaman lapangan, sementara DPRD mengartikulasikannya dalam bentuk regulasi dan anggaran. Sebagai contoh, warga yang melaporkan titik genangan air melalui aplikasi WargaKu kemudian dilibatkan dalam pemetaan drainase oleh Komisi A DPRD. Hasilnya, 37 titik rawan banjir diidentifikasi dan diusulkan masuk dalam RAPBD Perubahan 2025.²² Ini menunjukkan bahwa partisipasi warga memiliki dampak nyata terhadap respons kebijakan daerah.

Namun, membangun sinergi partisipatif tidak lepas dari tantangan. Pertama, kesenjangan literasi digital membuat sebagian kelompok rentan kurang optimal dalam menggunakan kanal pelaporan daring. Kedua, koordinasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan (misalnya antara DPRD kota dan provinsi) masih bergantung pada hubungan informal antarpersonil, bukan mekanisme kelembagaan yang mapan. Ketiga, terdapat kompetisi anggaran antara program penanggulangan banjir dan program lain yang dianggap lebih populis secara politik, sehingga implementasi kebijakan tidak selalu mencerminkan urgensi aspirasi warga.²³

Meski demikian, praktik kolaboratif antara DPRD dan masyarakat dalam isu banjir di Surabaya menunjukkan potensi untuk memperkuat tata kelola yang partisipatif dan responsif. Ketika warga bukan sekadar pelapor, dan DPRD bukan sekadar pendengar, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi

²¹ Ibid, Elain, M., 2025

²² Noerhayati, E. N., et al, “Analysis of Factors in Community Willingness to Manage Floods in East Java During the Pandemic.” *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, 16(1), 2024. <https://doi.org/10.4102/jamba.v16i1.1598>

²³ Ernawati, D., Istania, R., & Asropi, “The Relevance of Collaborative Governance in Disaster Anticipation in the Cities of Surabaya and Jakarta.” *Jurnal Public Policy*, 10(2), 2024, hal: 151-170. <https://doi.org/10.35308/jpp.v10i2.8660>

keduanya dapat menjadi model tata kelola penanggulangan banjir berbasis kemitraan yang layak diperluas di kota-kota lain di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa penanggulangan banjir di Surabaya tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat dan respons kelembagaan DPRD Surabaya. Partisipasi masyarakat terlihat dalam dua bentuk utama, yakni partisipasi individual yang bersifat adaptif, seperti membangun tanggul darurat dan menggunakan pompa air, serta partisipasi kolektif-komunal melalui kerja bakti, pelaporan genangan, dan keterlibatan dalam forum Musrenbang. Keterlibatan ini menunjukkan kesadaran kolektif yang kuat terhadap mitigasi bencana.

Sementara itu, DPRD Surabaya menjalankan fungsinya sebagai lembaga representatif melalui mekanisme reses, penyusunan Pokok Pikiran DPRD (Pokir), pengawasan program drainase, dan pembentukan Panitia Khusus Penanggulangan Banjir. Berdasarkan kerangka teori responsivitas, respons DPRD mencakup tiga aspek: penerimaan aspirasi (*input responsiveness*), perumusan kebijakan (*policy responsiveness*), dan pengawasan implementasi (*output responsiveness*).

Secara umum, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara partisipasi warga dan respons DPRD dalam menciptakan tata kelola penanggulangan banjir yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In M. S. Dr. Patta Rapanna, SE. (Ed.). *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). CV. syakir Media Pess.
- ANTARA JATIM. (2025, Januari 23). *DPRD Surabaya Bentuk Panitia Khusus Penanggulangan Banjir*.
<https://jatim.antaranews.com/berita/873718/dprd-surabaya-bentuk-panitia-khusus-penanggulangan-banjir>
- Arbayah, S., & Suparti, H. (2022). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Maburai

- Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Jurnal PubBis*, 6(1), 30–48. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v6i1.516>
- Cahyaningrum, P. A., Zakaria, M. F., & Jamal, A. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Pembangunan Sistem Drainase untuk Mengatasi Banjir di Kota Surabaya. *Jurnal Media Akademik*, 2(5). <https://doi.org/10.62281/v2i5.293>
- Deny Prastyo. (2024, April 16). *DPRD Soroti Penanganan Banjir di Surabaya, Ingatkan Warga Terlibat aktif*. DetikJatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7295541/dprd-soroti-penanganan-banjir-di-surabaya-ingatkan-warga-terlibat-aktif>.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. University of Chicago Press.
- Elaine, M. (2025, Januari 24). *DPRD Surabaya Bentuk Pansus Penanggulangan Banjir*. Suarasureabaya.Net. <https://www.suarasureabaya.net/kelanakota/2025/dprd-surabaya-bentuk-pansus-penanggulangan-banjir/>
- Ernawati, D., Istania, R., & Asropi. (2024). The Relevance of Collaborative Governance in Disaster Anticipation in the Cities of Surabaya and Jakarta. *Jurnal Public Policy*, 10(2), 151–170. <https://doi.org/10.35308/jpp.v10i2.8660>
- Imamsari, F. S., Triastuti, R., & Wijianto, W. (2017). Partisipasi Masyarakat pada Penanggulangan Banjir dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Educitizen*, 2(1).
- Husain, S. B. (2016). Banjir, Pengendaliannya, dan Partisipasi Masyarakat di Surabaya, 1950–1976. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 18(1), 65–80.
- Kominfo Jatim. (2024, Oktober 31). *Atasi Banjir, Pemkot Surabaya Kebut Pembangunan Saluran Air*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/atasi-banjir-pemkot-surabaya-kebut-pembangunan-saluran-air>
- Noerhayati, E. N., dkk. (2024). Analysis of Factors in Community Willingness to Manage Floods in East Java During the Pandemic. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, 16(1). <https://doi.org/10.4102/jamba.v16i1.1598>
- Pangestu, A. A., dkk. (2024). Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pakal Kota Surabaya.

- Journal of Visions and Ideas*, 4(3), 1540–1555.
<https://doi.org/10.47467/visa.v4i3.3158>
- Rohmaniyah, M., & Rohmadiani, L. D. (2020). Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Banjir Sungai Buntung di Kecamatan Waru. *Jurnal Teknik WAKTU*, 18(1), 15–25.
- Samosir, M. M., & Tukiman. (2024). Efektivitas Kebijakan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses SPRS Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan 1 Kota Surabaya. *Jurnal Publicuho*, 7(4).
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.565>
- Setianingrum, T., & Tsalatsa, Y. (2016). *Mempertanyakan responsivitas pelayanan publik pada pengelolaan pengaduan kasus Upik di Kota Yogyakarta*. 24().
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN Kuantitatif KUALITATIF DAN R&D* (M. Dr. Ir Sutopo. S.Pd (ed.); 2(5)). ALFABETA.
- Tinambun, M. (2023). *No Title Responsivitas pemerintah Pakpak Bharat dalam mengendalikan harga jual gambir (Studi penguatan ekonomi petani gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat)*.